

DARI KERATON KE PASAR: INDUSTRI PRIBUMI DI DAERAH YOGYAKARTA 1830 – 1930-AN

*Anton Haryono**

ABSTRACT

This article deals with the development of the indigenous industry in Yogyakarta during the colonial period (1830s – 1930s). It is concerned with three aspects: the diversity, absorptive power, and achievement of the indigenous industry. The results showed that the indigenous industry of the colonial era in Yogyakarta had a vast spectrum and was capable of developing dynamically although it never constituted the main stream of the society's economic life. In 1930, its ability to absorb workers was the highest in Java and Madura, and not much difference was found from that of the agriculture. Besides, some branches of the indigenous industry in Yogyakarta found wide markets for their products. The long established manufacturing tradition and the increase of money circulation since 1830 were found to be factors affecting the dynamics of the Yogyakarta's indigenous industry.

Keywords: industri, pribumi, kolonial, Yogyakarta.

PENGANTAR

Usaha di bidang industri bukanlah fenomena baru di Pulau Jawa. Hanya saja, usaha ini bukan merupakan arus utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang sejak jauh di masa lampau bertumpu pada sektor pertanian. Posisi unggul sektor pertanian tidak serta merta mencair ketika orang-orang Belanda datang, bahkan kolonialisme mereka semakin memperkuatnya. VOC, yang pada awalnya bergerak di bidang perdagangan, kemudian tergoda untuk menguasai wilayah, merebutnya dari penguasa Jawa, serta mengadopsi penyerahan wajib hasil tanaman dan penanaman kopi secara paksa, yang oleh Burger diberi predikat "dari pedagang menjadi raja" dan "dari dagang ke agraria" (Burger, 1957:80). Pemerintah kolonial yang menggantikannya, secara ber-

kesinambungan juga memacu laju pengembangan usaha yang berkaitan dengan tanaman ekspor. Memang, memasuki abad ke-20, pemerintah mulai memikirkan pentingnya pengembangan industri di Hindia Belanda, tetapi realisasinya yang cukup signifikan baru terlihat pada tahun 1930-an, yakni seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dunia (Oorschot, 1956:11-59).

Sektor industri yang memiliki kedudukan marginal dalam kegiatan ekonomi pribumi antara lain tampak pada awal abad ke-19, yang dinilai oleh Burger sebagai suatu usaha yang tidak berarti (Burger, 1939:4). Pada 1830, diperkirakan tidak lebih dari 6% rumah tangga di Jawa yang memiliki mata pencarian dalam ekonomi nonpertanian (Fernando, 1993:91). Jumlah yang tidak lebih dari 6% inipun

* Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

merupakan penggabungan dari 4 sektor, yakni industri, perdagangan, publik, dan jasa (Fernando, 1993:91). Dari sini tampak sekali marginalitas sektor industri bila ditinjau dari jumlah rumah tangga yang memperoleh pendapatan darinya. Barangkali karena sifat marginalnya itu, Furnivall (1939), yang melabeli bukunya tentang Hindia Belanda *A Study of Plural Economy*, praktis tidak membicarakan industri pribumi secara memadai.

Meskipun marginal, sektor industri yang dikembangkan oleh orang pribumi tidaklah statis. Fernando (Fernando, 1993:89-100) telah melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam kegiatan ekonomi nonpertanian dari penduduk di Jawa sejak tahun 1830-an. Ia tidak hanya memberikan bukti tentang lonjakan jumlah tenaga kerja nonpertanian, yang pada tahun 1880-an mencapai 23% dari jumlah total tenaga produktif, tetapi juga menyajikan gambaran khusus tentang banyaknya cabang usaha dan luasnya daerah penjualan bagi produk-produk industri pribumi. Dari hasil studinya juga diketahui bahwa pada tahun 1880-an, 40% sektor manufaktur terpusat di Jawa Tengah, suatu kawasan yang menurutnya memiliki tradisi kuno di bidang manufaktur yang kuat dan andilnya di bidang perdagangan pun lebih besar dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Lebih lanjut, Fernando melihat bahwa peredaran uang dan kesejahteraan yang meningkat telah memperluas aktivitas ekonomi nonpertanian tersebut.

Studi Fernando dapat dianggap sebagai sebuah catatan penting bagi industri pribumi yang marginal itu, yang pada dirinya sendiri terdapat spektrum luas dan perkembangan dinamis. Hanya saja, cakupan spasial studi tadi terbatas di daerah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial. Fenomena yang sama dapat terjadi di Daerah Kerajaan, mengingat tradisi manufaktur yang kuat (Carey, 1981) dan peredaran uang yang meningkat (Houben, 2002: 660-666) juga ditemukan di sana. Tradisi pertukangan dan kerajinan berkaitan dengan keraton, sedangkan meningkatnya peredaran uang berhubungan dengan perkebunan swasta

Barat. Untuk itu, pada kesempatan ini, akan dibicarakan mengenai dinamika industri pribumi di salah satu Daerah Kerajaan, yakni Daerah Yogyakarta, pada masa kolonial; dengan tujuan, untuk memberikan catatan kecil tentang marginalitasnya, terutama ditinjau dari keragaman, daya serap, dan prestasi yang pernah dicapai pada periode 1930 – 1930-an.

TRADISI TIADA HENTI

Kegiatan memproduksi barang, terlepas dari sistem dan tujuan yang mendasari, telah berlangsung di daerah Yogyakarta jauh di masa lampau. Pada zaman Senopati (1575-1601) berbagai bentuk kerajinan tangan digalakkan di lingkungan Keraton Kotagede; ringkasnya, dari seni pandai emas dan perak (Soepardi, 1932:820) hingga pembuatan batu bata (Graaf, 1985:282-283). Meskipun demi kemasyurannya sendiri, Senopati adalah raja penggiat kerajinan; bahkan, ia juga dikenal sebagai penganjur didirikannya pengecoran besi di Batur (Ceper, Klaten) untuk memproduksi mata bajak pada tahun 1590 (Wilde, 1941:169), yang masih hidup hingga sekarang. Pada zaman itu, pembuatan gula kelapa untuk komoditas perdagangan pun dapat ditemukan di Gunungkidul (Graaf, 1985:295-296).

Mataram, terutama pada masa Sultan Agung (1613-1645), terkenal dengan perang-perang penaklukannya ke pusat-pusat kekuasaan di Pantai Utara Jawa. Serangkaian peperangan sering diikuti dengan dibawanya ribuan orang taklukan, laki-laki ataupun perempuan, untuk dijadikan penduduk dan dipekerjakan di Mataram. Di antara mereka terdapat lebih banyak perajin yang cakap daripada orang-orang Mataram sendiri (Graaf, 1986:49). Meskipun pada awalnya berkarya dalam situasi tertekan, mereka adalah tenaga-tenaga potensial bagi berkembangnya kerajinan dan pertukangan yang mengabdikan kepada kepentingan raja.

Keraton, selain membutuhkan barang-barang pakai kebutuhan sehari-hari, juga sangat berkepentingan terhadap diproduksinya barang-barang mewah yang mampu men-

dukung kultus kemegahan raja. Untuk itu, tenaga-tenaga terampil senantiasa dipekerjakan di istana, baik pada saat keraton masih di Kotagede, di Kerta, maupun di Plered. Pada zaman Amangkurat I (1646-1677), misalnya, Keraton Plered mempekerjakan ribuan perempuan untuk melakukan pekerjaan dapur, pemintalan benang, penenunan, pembuatan bordir, pembatikan, penjahitan, dan berbagai jenis pekerjaan wanita lainnya (Rouffaer, 1904:16).

Selepas era Keraton Plered, daerah Yogyakarta, kurang lebih selama 75 tahun, menjadi agak jauh dari kota istana, karena pusat kekuasaan pindah di Kartasura (1680-1746) dan periode berikutnya di Surakarta (Ricklefs, 1991:110-145). Meskipun demikian, di daerah Yogyakarta terdapat dua kompleks makam raja, yakni di Kotagede dan Imogiri, yang selalu dirawat oleh raja-raja keturunan Senopati. Sejak dulu, dalam rangka merawat makam, raja menunjuk orang-orang pilihan di antara penduduk yang tinggal di daerah sekitar makam. Sebagai imbalan dari tugas itu, mereka dibebaskan dari kerja wajib bagi tuan tanah dan menerima sebidang tanah jabatan. Setelah merawat makam, masih ada banyak waktu bersisa yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Demikianlah, mereka kemudian menekuni pekerjaan tangan dan di antara mereka juga ditemukan para perajin emas, perak, tembaga, tukang kayu, tukang *wedel*, dan lain-lainnya (Angelino, 1930:177). Jadi, ketika pusat kekuasaan pindah di Kartasura, dan kemudian di Surakarta, sektor kerajinan tetap memiliki penekun di daerah Yogyakarta.

Sangat mungkin, pada periode kerajaan tunggal Kartasura dan Surakarta, keperajinan di daerah Yogyakarta berkembang dengan lebih baik, karena jauh dari medan peperangan antar faksi bangsawan istana. Pada periode itu, terjadi perang-perang pergantian tahta yang sangat destruktif; bahkan, perang suksesi yang terakhir harus diselesaikan dengan pembagian kerajaan menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta, melalui Perjanjian Giyanti pada

tahun 1755 (Ricklefs, 1974:37-95). Dengan munculnya Kasultanan Yogyakarta, sektor kerajinan yang selama 75 tahun sedang agak jauh dari pusat kekuasaan itu, sejak 1755 kembali memperoleh kedekatannya dengan keraton.

Mangkubumi, raja pertama Kasultanan Yogyakarta, merupakan raja besar di antara raja-raja Mataram dan seorang pembangun besar dalam tradisi raja Jawa. Bangunan-bangunan spektakuler, seperti keraton dan *Tamansari* beserta tembok tebal yang mengelilinginya, merupakan unsur penting dalam menunjukkan haknya untuk diakui sebagai raja (Ricklefs, 1974:84). Saling berlomba dalam kesemarakan istana antara Surakarta dan Yogyakarta menjadi tidak terhindarkan. Apalagi, pada masa-masa awal masih terdapat ambisi kekuasaan dari Mangkubumi untuk menyatukan kembali kerajaan yang terbelah (Ricklefs, 1977:96-118). Mengingat unjuk kekuatan militer tidak lagi dapat ditempuh, maka kultus kemegahan mensyaratkan kepemilikan sarana-sarana lain dengan lebih optimal, termasuk harta benda dan pusaka. Dari sini keperajinan, meskipun dalam perspektif kepentingan keraton, memperoleh daya dorong baru, karena beberapa cabang kerajinan akan menghasilkan barang-barang mewah yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut. Selain itu, keraton juga membutuhkan barang-barang praktis dalam jumlah besar.

Berkebalikan dengan periode sebelumnya, Jawa pasca Perjanjian Giyanti adalah Jawa yang lebih damai (Ricklefs, 1991: 151) sehingga kondusif bagi aktivitas ekonomi. Pada periode ini, setidaknya hingga awal abad ke-19, Jawa mengalami zaman kemakmuran yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya (Carey, 1981:5). Hal ini ditandai dengan terselenggaranya perdagangan masyarakat dari Daerah Kerajaan dengan Pantai Utara Jawa yang dikuasai oleh Belanda, dengan komoditas antara lain: beras, tembakau, nila, kapas, benang kapas, kain tenun, kain batik, tikar pandan, dan minyak kacang (Carey, 1981:5). Dari sejumlah komo-

ditas itu tampak bahwa kerajinan di Daerah Kerajaan pasca Perjanjian Giyanti tidak hanya mengabdikan kepada istana, tetapi juga telah berorientasi untuk melayani pasar. Selain itu, dengan memperhatikan jenis-jenis barang tadi, kegiatan industri telah menjangkau daerah pedesaan.

Pada awal abad ke-19, kain dan benang kapas merupakan barang dagangan terpenting ketiga dari Daerah Kerajaan setelah padi dan tembakau (Carey, 1981:11). Pada 1808, tercatat 7.000 kodi sarung warna dan 1.000 kodi selendang dari Bagelen, serta 1.500 kain putih dan 1.200 kodi kain batik dari Mataram (Yogyakarta sekarang) diekspor ke Pantai Utara Jawa. Dari Yogyakarta setiap tahunnya juga diekspor 480 pikul (1 pikul = 61,761 kilogram) benang biru ke Semarang; dan, produk lainnya dari daerah ini yang laku keras di Pantai Utara adalah kain *kelengan* (batik biru sederhana) dan kain *lurik* (Carey, 1981:12). Sudah tentu volume produksi dari berbagai jenis kain di atas jauh lebih besar dari volume ekspornya. Mengingat proses produksinya tanpa alat bantu mesin, maka daya serapnya terhadap tenaga kerja dapat diperkirakan cukup tinggi dan pengerjaannya pun tidak terkonsentrasi di satu tempat tertentu, tetapi tersebar dalam bentuk industri rumah dan industri kecil.

Cabang-cabang industri lainnya pada awal abad ke-19 di antaranya adalah: minyak kelapa, nila cair, gula kelapa, dan garam, serta cabang-cabang industri pengolah besi, baja, dan tembaga. Bahkan, tembaga, oleh orang-orang Kotagede dipakai untuk mencetak mata uang logam, yang berlangsung hingga tahun 1818 (Carey, 1981:12). Ini semua memberikan bukti kuatnya tradisi pertukangan dan kerajinan di daerah Yogyakarta, yang pada awalnya memang diarahkan dan demi kepentingan keraton, tetapi kemudian juga semakin berorientasi pasar.

KERAGAMAN INDUSTRI

Mewarisi masa lalunya, meskipun tidak menjadi arus utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat, industri pribumi di daerah Yogya-

karta pada tahun 1830-an telah menunjukkan spektrum yang luas. Pada waktu itu cabang-cabang industri yang dikembangkan meliputi: pembuatan garam, pembuatan minyak kelapa dan gula kelapa, penenunan, pembatikan, pengolahan nila cair, pencelupan, pembakaran kapur, pembuatan barang-barang dari logam (emas, perak, tembaga, kuningan, dan besi), pertukangan kayu, penyamaan dan pengolahan kulit, kerajinan batu, batu bata dan gerabah, dan pertukangan lain (A.V. 1836 dan 1838). Penyebutan "pertukangan lain" dalam *Algemeen Verslag* (A.V.) terkutip semakin memberikan gambaran tentang keragaman industri.

Keragaman industri pribumi di daerah Yogyakarta tersaji lebih lengkap pada pameran tahun 1852 dalam rangka menyambut kunjungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke Yogyakarta. Produk-produk yang dipamerkan pada waktu itu antara lain meliputi berbagai macam senjata tradisional (keris, tombak, pedang, dan panah), barang-barang dari emas dan perak, aneka jenis kain batik, payung biasa dan payung warna emas, berbagai produk anyaman, produk tembaga tuang (tempat nasi, kuali, dan perabot lain), barang-barang dari besi (timbangan, kunci, skrup, stempel, tang, dan lain-lain), berbagai barang dari tanah liat, barang-barang dari kulit, pakaian Jawa, alat-alat pertanian, produk bordir, pot bunga, peralatan dapur, aneka macam produk kayu, peralatan untuk menangkap ikan, manik-manik, gamelan, dan alat potong (A.V. 1852). Ringkasnya, dari barang-barang mewah yang bertengger di keraton, yang sering menjadi pendukung bagi kultus kemegahan raja (Moertono, 1985:72-85), hingga barang-barang murah yang berserak di dapur petani.

Laporan-laporan umum residen cenderung menilai bahwa industri pribumi pada dekade itu meningkat dan semakin berkembang. Di antara orang pribumi ditemukan hampir semua jenis kerajinan, dan untuk kepentingan itu, daerah Yogyakarta tidak kekurangan tenaga cakap yang dapat bersaing dengan tenaga lain di Hindia Belanda; mereka, dengan peralatan yang sederhana, dapat menghasilkan produk

yang layak untuk dikagumi (A.V. 1854-1859). Pada saat yang sama, transaksi dagang dilaporkan mengalami banyak peningkatan, sampai-sampai residen pada waktu itu menyebut daerah yang dipimpinnya mirip sebuah pasar (A.V. 1852). Kiranya dalam konteks ini, berbagai produk kerajinan memiliki kontribusi yang signifikan.

Perkembangan yang cukup bagus pada tahun 1850-an, praktis juga dapat ditemukan pada tahun 1870-an, terutama industri batik yang sangat menyibukkan banyak orang (A.V. 1873). Cabang-cabang industri yang cukup banyak, ditambah dengan produk-produk yang bervariasi pada sejumlah cabangnya, terus terpelihara pada masa-masa selanjutnya. Bahkan dalam konteks pribumi, pada 1930-an, jumlah cabang industri yang berkembang di daerah Yogyakarta merupakan yang paling banyak di Jawa dan Madura (Sitsen, 1937:197-198). Pada sumber terkutip, juga ditemukan beberapa cabang industri yang tidak disebutkan pada sumber-sumber sebelumnya, seperti pembuatan rokok dan industri makanan, yang menyerap tenaga kerja ribuan orang.

Dalam konteks usaha pribumi, selain industri barang, di daerah Yogyakarta juga terdapat industri jasa angkutan, yang dari waktu ke waktu menunjukkan vitalitasnya yang tinggi, bermula dari kuda beban, gerobak, dan kereta kuda (A.V. 1833 dan K.V. 1892, Bijl. C. 14:3), kemudian pada abad ke-20 dilengkapi dengan mobil sewaan, prahoto, dan bus (MvO 1934:21). Usaha ini, antara lain ditekuni oleh orang-orang Kalang (Yogyakarta) yang bermukim di Tegalendu, Kotagede; dan daripadanya, mereka mampu memiliki kekayaan yang menimbulkan kekaguman bagi banyak orang (Nakamura, 1983:47). Satu hal menarik, ketika kereta api antar daerah telah lama beroperasi, pada awal tahun 1890-an angkutan tradisional masih laku keras, antara lain untuk mengangkut produk tanaman ekspor dari pabrik-pabrik di tanah sewaan ke stasiun dan masih sering pula untuk pengangkutan barang dari dan ke Semarang (K.V. 1892).

Industri jasa lainnya adalah pegadaian yang ditekuni oleh orang-orang Kalang (Surakarta) yang juga bertempat tinggal di Tegalendu. Usaha yang dimulai pada peralihan abad ke-19/20 ini membawa keuntungan yang sangat besar bagi para pelakunya (Nakamura, 1983: 47). Peredaran uang yang disebut oleh sejumlah sumber terus meningkat seiring dengan ekspansi perkebunan, antara lain memperoleh buktinya yang kuat pada jasa pegadaian. Terlepas dari itu, keberadaan usaha jasa—angkutan dan pegadaian—semakin memperkaya gambaran tentang spektrum luas industri pribumi di daerah Yogyakarta, yang arus utama masyarakatnya hidup dari sektor pertanian.

Keragaman industri pribumi di daerah Yogyakarta pada masa kolonial tidak hanya tampak dari banyaknya cabang dan bervariasinya produk pada sejumlah cabang industri, tetapi juga terlihat pada beberapa segi lainnya. Dari segi bahan baku, terdapat banyak cabang industri pengolah bahan baku setempat (garam, minyak kelapa, gula kelapa, gula aren, tepung, blawu, kulit, tanduk, kayu, anyaman, batu, kapur, genteng, batu bata, dan gerabah); dan tidak sedikit cabang industri yang mengolah bahan baku impor (tenun, batik, emas, perak, perunggu, besi, dan kaleng). Sumber daya alam setempat yang berlimpah diberi nilai tambah; sementara demi dihasilkannya barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ketiadaan bahan bakunya di daerah setempat bukan alasan untuk tidak dikerjakan.

Perbedaan tempat asal bahan baku telah menimbulkan perbedaan tantangan. Kelangkaan bahan beberapa kali dialami oleh cabang-cabang industri pengolah komoditas impor, seperti yang terjadi pada periode Perang Dunia I sehingga menyulitkan kegiatan usaha, terutama ketika daya beli masyarakat sedang merosot. Untuk menyasati modal yang terbatas, beberapa cabang industri tipe ini sering membeli bahan baku secara kredit, seperti pada industri tenun dan batik (Sitsen, 1937:149;

Soerachman, 1927:27); atau menerapkan prinsip daur ulang, seperti pada kerajinan emas, perak, tembaga, besi, dan batik (K.V. 1892:2; Jasper, 1902:217; Soerachman, 1927: 40).

Pada aspek produksi, industri pribumi dapat dipilah-pilahkan atas dasar perajinnya (jenis kelamin, kelas sosial, dan motivasi kerja). Pembuatan barang-barang dari logam, kayu, batu, kulit, kapur, genteng, dan batu bata, cenderung dilakukan oleh kaum laki-laki; pembuatan produk tenun, batik, minyak kelapa, gula kelapa, tepung, dan makanan dominan dikerjakan oleh kaum perempuan; dan kegiatan lain, seperti pembuatan anyam-anyaman, gerabah, dan payung, memperlihatkan sifat campuran (*Economisch-Weekblad*, 1941). Pada 1930-an, jumlah tenaga kerja perempuan jauh lebih besar daripada jumlah tenaga kerja laki-laki (Sitsen, 1937:197-198); dan mengingat cabang-cabang usaha tidak banyak mengalami perubahan, diperkirakan komposisi seperti ini sudah berlangsung pada masa-masa yang lebih awal.

Para perajin keraton ataupun perajin di kota istana hanyalah sebagian dari penopang industri pribumi. Tidak sedikit keperajinan yang dilakukan oleh masyarakat biasa yang tinggal di desa-desa. Secara tradisional tenun, misalnya, lebih merupakan fenomena desa daripada kota. Sifat pedesaan juga berlaku bagi berbagai kegiatan pengolahan hasil bumi, pembuatan garam, anyam-anyaman, gerabah, genteng, batu bata, pembakaran kapur, dan pandai besi sederhana. Bahkan, batik tulis yang telah lama ditekuni para perempuan kelas elit kota pun, kemudian juga melibatkan para perempuan miskin di desa-desa (Angelino, 1930:175). Dari sini terlihat jelas, industri pribumi di daerah Yogyakarta pada masa kolonial tidak hanya terkonsentrasi di kota, tetapi juga tersebar luas di desa-desa.

Motivasi seseorang dalam memproduksi barang secara jelas juga menunjukkan keragaman. Sejumlah besar orang memproduksi barang sebagai pekerjaan sampingan dalam

bentuk industri rumah, seperti yang tampak menonjol pada industri tenun sebelum revitalisasi pada 1930-an dan anyam-anyaman (K.V. 1892:12). Cukup banyak pula kelompok perajin yang menekuni usahanya sebagai pekerjaan pokok; dan usaha ini dapat dalam bentuk industri kecil, dan kebanyakan memang demikian, atau industri dalam skala yang lebih besar. Batik merupakan salah satu contoh cabang industri yang bergerak dari sekedar industri rumah hingga industri besar (Rouffaer, 1904: 23-25). Pada 1930-an, usaha tenun yang dalam waktu lama praktis ditekuni sebagai kerajinan rumah, telah menjelma pula dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang jauh lebih kapitalistik (MvO 1934:526).

Tingkat keluasan daerah penjualan juga dapat membedakan antara cabang industri yang satu dengan cabang industri lainnya. Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikutip, anyam-anyaman, perabotan dari kayu, dan barang-barang dari tanah liat, dapat dicontohkan sebagai produk yang lebih banyak berkulat di daerah Yogyakarta sendiri. Sementara itu, produk tenun, batik, tembaga, perak, minyak kelapa, dan gula kelapa mampu menembus pasar-pasar di karesidenan lain. Bahkan, batik dan perak pernah memiliki prestasi fenomenal, dikenal luas hingga mancanegara.

Selain tingkat keluasan daerah penjualan, terdapat perbedaan kelas sosial konsumen antara cabang industri yang satu dan cabang industri lainnya. Kelas sosial konsumen kain tenun desa berbeda dengan kelas sosial konsumen batik tulis. Konsumen batik tulis dan konsumen batik cap, apalagi batik cap yang paling kasar, pun dapat menunjukkan kelas sosial yang tidak sama. Sama-sama perabotan dapur, barang-barang dari tanah liat akan memiliki kekuatan mengalir ke kelas bawah yang lebih besar dibandingkan barang-barang dari tembaga. Ini semua dapat dibahasakan secara lain, yakni berkat keragaman cabang dan produknya, industri pribumi dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

DAYA SERAP DAN PRESTASI INDUSTRI

Kesibukan yang relatif tinggi dan meluas dalam kegiatan industri pribumi sejak 1830-an terlihat dari data-data sebagai berikut. Pada tahun 1836, ketika jumlah penduduk di daerah Yogyakarta baru mencapai 306.973 jiwa (A.V. 1836), terdapat 500 keluarga penekun usaha tenun di Sleman, 3.000 keluarga pembuat minyak kelapa dan 100 keluarga pembuat nila cair di Kalasan, 800 keluarga penekun usaha pencelupan di seluruh daerah, 1.500 keluarga pembuat gula kelapa di Bantul dan Sleman, dan 773 keluarga pembuat garam di Pantai Selatan (Carey, 1981:13). Tempat-tempat yang disebut di atas mengacu pada pengertian wilayah yang terdiri dari banyak desa, karena pada waktu itu daerah inti Kesultanan Yogyakarta, yang terletak di antara Sungai Opak di timur dan Sungai Progo di barat, dibagi ke dalam 3 wilayah (kabupaten), yakni Sleman, Kalasan, dan Bantul.

Usaha-usaha di atas bukanlah gambaran dari seluruh aktivitas industri, tetapi sekedar contoh dari usaha-usaha yang cukup menonjol dan ditekuni sebagai suatu spesialisasi, dan contoh itupun terbatas di daerah inti, atau tidak termasuk wilayah Kulonprogo dan Gunungkidul sekarang. Artinya, jumlah orang atau keluarga yang menekuni sektor industri, termasuk yang dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, lebih besar lagi. Jumlah penekun industri pada data ilustrasi, 6.673 keluarga, pun sudah menunjukkan angka yang agak besar, karena jumlah penduduk pada waktu itu hanya 306.973 jiwa. Bila 1 keluarga rata-rata terdiri dari 4 orang, jumlah penduduk tersebut setara dengan 76.743 keluarga. Dengan demikian, jumlah keluarga penekun industri pada data ilustrasi saja telah mencapai 8,7% dari jumlah total keluarga. Jumlah 91,3% sisanya tidak serta merta semuanya hidup dari sektor pertanian, karena masih ada sektor pekerjaan lain, yakni sektor publik, perdagangan, jasa, dan sektor industri yang tidak terdata. Selain itu, tentu saja terdapat keluarga-keluarga yang tidak produktif lagi karena faktor usia.

Besarnya proporsi jumlah orang yang hidup dari ekonomi nonpertanian juga tampak pada data tentang keadaan tahun 1890 yang termuat dalam *Koloniaal Verslag 1892* (Bijl. A:14-15). Pada waktu itu, dari jumlah total 174.262 tenaga kerja, yang tercatat memiliki usaha di sektor pertanian hanya 44.643 jiwa (25,6%). Jumlah ini rupa-rupanya hanya mencakup petani pemilik dan yang semata-mata hidup dari sektor pertanian, mengingat klasifikasi data terlalu banyak (26 jenis pekerjaan) sehingga petani yang kebetulan memiliki kolam ikan atau beternak dan berjualan ternak, misalnya, tidak dimasukkan ke dalamnya. Meskipun demikian, kendati jumlah petani harus diperbesar, data dari *Koloniaal Verslag* (K.V.) tersebut tetap dapat memberi gambaran tentang besarnya proporsi orang yang hidup dari ekonomi nonpertanian, yang salah satunya adalah sektor industri.

Pada tabel yang disajikan *Kolonial Verslag 1892*, terdapat sejumlah kolom yang dapat dimasukkan ke dalam sektor industri, yakni pembuat garam, pemilik dan pengemudi gerobak, pandai emas dan perak, perajin senjata, perajin meubel, perajin payung, dan tukang cat biru, yang jumlah totalnya 5.675 jiwa. Perajin tenun, batik, anyaman, tembaga, besi, kaleng, tanduk, kulit, batu, batu bata, genteng, gerabah, gula kelapa, dan minyak kelapa rupa-rupanya dimasukkan ke dalam kategori "tukang dan perajin/pekerja tangan lain, termasuk pemborong, kuli, dan lain-lain", yang jumlahnya tercatat 66.049 jiwa. Karena ada aspek "pemborong, kuli, dan lain-lain", jumlah tadi bukan sepenuhnya milik sektor industri. Namun, jumlah perajin diperkirakan cukup besar, karena cabang-cabang industri yang harus diwadahi dalam kategori itu cukup banyak dan tidak sedikit yang ditekuni secara luas dan daya serapnya lebih tinggi daripada cabang-cabang industri yang terdata eksplisit.

Persentase yang cukup tinggi jumlah orang pribumi yang menekuni sektor industri terlihat jelas pada tahun 1930. Pada waktu itu, jumlah penduduk di daerah Yogyakarta 1.538.868 jiwa;

273.060 jiwa (17,7%) di antaranya hidup dari sektor pertanian, dan 163.397 jiwa (10,6%) dari sektor industri (Sitsen, 1937:197-198). Terlihat, proporsi antara penekun pertanian dan industri tidak begitu timpang, hanya terpaut 7,1%. Menariknya lagi, persentase penekun sektor industri (dari jumlah penduduk) di daerah Yogyakarta tadi merupakan yang paling tinggi di Jawa dan Madura. Jumlah penekun industri di Jawa dan Madura sendiri hanya 4,0% dari jumlah total penduduknya (Sitsen, 1937:197-198) sehingga capaian daerah Yogyakarta sebesar 10,6% cukup fenomenal. Tradisi keperajinan yang telah lama terbangun, bahkan akar-akar historisnya dapat dilacak hingga zaman Senopati, kiranya memiliki kontribusi yang sangat signifikan.

Pada tahun 1930, berdasarkan data olahan dari Tabel Sitsen, selain Yogyakarta yang menduduki urutan teratas, karesiden yang jumlah orang pribumi penekun industrinya di atas 4,0% adalah: Jepara-Rembang (7,1%), Surakarta (5,9%), Banyumas (5,1%), Pekalongan (5,0%), Jakarta (4,7%), Kedu (4,5%), Surabaya (4,5%), dan Kediri (4,5%). Sementara itu, jumlah penekun industri pada 10 karesidenan lain berkisar dari 3,7% (Madura) hingga 1,1% (Banten) dari jumlah penduduk masing-masing. Dari sini dapat diketahui bahwa tingkat marginalitas sektor industri di daerah Yogyakarta berada pada urutan paling bawah, atau dapat disebut marginalitas minimum.

Dihitung dari jumlah total penduduk, di kawasan subur dan padat penduduk yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Sleman, Kotamadya Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, pada tahun 1930, jumlah orang yang bekerja di sektor industri mencapai 13,7%. Sungguh menarik, persentase ini sedikit lebih besar dari persentase jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian (13,4%). Pada tahun yang sama, di wilayah yang sekarang terintegrasi ke dalam Kabupaten Kulonprogo, jumlah orang yang bekerja di sektor industri 11,3% dan di sektor pertanian 23,7%. Sementara itu, di Kabupaten Gunungkidul, penekun sektor industri hanya

1,5% dan sektor pertanian 24,6%. Terlihat jelas, di daerah Yogyakarta, hanya Kabupaten Gunungkidul yang miskin penekun industri.

Selain tingkat kepenekunan yang cukup tinggi, seperti tercermin dari realitas 1836, 1890, dan 1930, sejumlah cabang industri pribumi di daerah Yogyakarta pada masa kolonial pernah memiliki reputasi pasar yang baik bagi produk-produknya. Garam dari Pantai Selatan, yang pada 1830-an telah dibatasi oleh pemerintah kolonial hanya boleh dikonsumsi di daerah Yogyakarta sendiri (A.V. 1836), pada awal 1890-an masih banyak dijual secara ilegal di daerah perbatasan Kedu (K.V. 1892, Bijl. C. 13: 4) dan Surakarta (K.V. 1892, Bijl. C. 15:5). Minyak kelapa, pada tahun 1836 berhasil diekspor ke karesidenan lain sebanyak 9.000 pikul senilai 63.000 gulden, ketika harga 1 pikul beras hanya 2 gulden (A.V. 1836), yang pada tahun 1840 meningkat menjadi 10.000 pikul senilai 70.000 gulden (A.V. 1840). Eksportasi komoditas ini terus berlangsung, tetapi pada awal 1890-an mulai surut seiring dengan meningkatnya eksportasi kopra dan gula kelapa (K.V. 1892, Bijl. C. 14:2). Eksportasi gula kelapa sendiri telah dapat ditemukan pada tahun 1830-an dan masih dapat dijumpai pada periode setelah tahun 1890-an. Pada tahun 1930-an, bersama-sama dengan minyak kelapa juga masih ditekuni di hampir semua kabupaten (Sitsen, 1937:197-198).

Pada tahun 1830-an pembuatan kain tenun pribumi memang telah terganggu oleh masuknya kain impor (A.V. 1836), akan tetapi kegiatan ini sedikit banyak dibentengi oleh tradisi. Pada tahun 1870-an, arus masuk kain impor ke Yogyakarta cukup besar, namun pada saat yang sama industri tenun masih banyak ditekuni di desa-desa (A.V. 1874-1879). Masyarakat pada waktu itu memang amat menyukai kain putih impor, tetapi untuk bahan pakaian, mereka lebih mengutamakan kain batik, ikat kepala batik, atau *kain lurik* buatan pribumi (A.V. 1874). Dari keterangan di atas terlihat bahwa kain impor mendesak kain pribumi terutama pada kain putih, yang sesungguhnya dalam jumlah besar untuk bahan baku batik.

Sementara itu, kain warna impor tidak dapat segera menggeser kain *lurik* warisan masa lalu yang khas. Bahkan pada awal tahun 1890-an, kain *lurik* Yogyakarta masih banyak diminati masyarakat di Karesidenan Kedu dan Madiun berkat mutu dan ketahanannya yang baik (K.V. 1892, Biji. C. 13:2 dan 16:3).

Industri tenun rupa-rupanya merosot tajam pada periode Perang Dunia I, karena harga bahan-bahan baku impor, termasuk benang, melonjak ("Achterlijkheid", 1926:54). Bila dulu benang impor yang murah harganya merupakan keringanan tersendiri, kini kelangkaannya di pasar, karena arus masuknya mengkerut, merupakan pukulan tersendiri. Dari keadaannya yang menyedihkan, pada paruh kedua tahun 1920-an, penggiatan industri tenun mulai dilakukan, dan pada tahun 1930 tercatat puluhan ribu orang desa bertekun kembali pada kerajinan tenun rumah (Sitsen, 1937:197-198). Revitalisasi industri tenun menemukan momentum terbaiknya pada tahun 1930-an, antara lain karena dorongan kuat dari pemerintah (MvO 1934: 525) dan begitu mendesaknya masyarakat untuk memperoleh uang kontan di zaman *meleset* (O'Maley, 1977:192-193).

Cabang industri yang cukup fenomenal, baik dari segi mutu produk, maupun luasnya penekunan dan daerah penjualan, adalah industri batik. Pada awal abad ke-20, daerah Yogyakarta, bersama-sama Surakarta, masih dapat mempertahankan keterkemukaannya untuk menghasilkan batik yang paling indah, paling asli, dan paling aristokratis, yang tetap dicari oleh semua pembesar pribumi di Jawa (Rouffaer, 1904:27). Eksportasi ke daerah lain yang telah berlangsung jauh sebelum Perang Diponegoro (Carey, 1981:11) terus dilakukan dalam rentang waktu yang panjang. Hingga masa menjelang Perang Dunia I, dalam konteks persaingan pasar dengan kain impor, industri batik berdiri jauh lebih kuat daripada industri tenun (Koperberg, 1922:148). Hal ini antara lain berkaitan dengan gengsi sosial batik dalam kultur Jawa tradisional. Rouffaer (1904: 27) pernah mengemukakan, setiap orang

pribumi yang mampu membayar akan tetap memilih kain batik tulis daripada batik cap, dan kain batik cap daripada kain cetak dan kain warna buatan pabrik Eropa.

Munculnya batik cap sering dianggap sebagai kemunduran seni batik, karena mutunya yang lebih rendah dari batik tulis. Namun, bila ditinjau dari sisi lain, pembuatan batik cap sesungguhnya merupakan inovasi besar. Selain pengerjaannya lebih cepat dan dapat dilakukan dalam jumlah besar, harganya pun dapat ditekan jauh lebih rendah daripada harga batik tulis. Dalam konteks ini, batik cap memiliki fungsi strategis untuk memperluas segmen pasar batik. Agar banyak lapisan sosial terlayani oleh industri batik, batik cap setidaknya dibuat dalam tiga jenis mutu, yakni halus, sedang, dan kasar (Soerachman, 1927:12).

Batik cap yang muncul di Jawa pada pertengahan abad ke-19 (Rouffaer, 1904:21), pada awal tahun 1870-an telah ditekuni di daerah Yogyakarta oleh sekitar 100 orang perajin, yang sebagian dari produk mereka diekspor ke karesidenan lain (Rovers, 1873:425). Rupa-rupanya, arus deras kain impor pada 1870-an dan disebut-sebut kain putihnya amat disukai, berkaitan dengan berkembangnya industri batik cap. Dapat dikatakan, dengan bahan baku kain putih impor, batik cap merupakan alat ampuh bagi industri batik untuk berkompetisi dengan kain warna impor. Tanpa batik cap, industri batik di daerah Yogyakarta tidak pernah akan memiliki pasar yang sedemikian luas.

Sama seperti industri tenun, selama Perang Dunia I, industri batik mengalami kesulitan dalam pengadaan kain putih dan bahan pewarna impor. Karena pada waktu itu harga bahan baku melambung dan daya beli masyarakat merosot, banyak perusahaan batik besar mengkerut dan pemodal-pemodal kecil gulung tikar (Rovers, 1873:425). Pada 1920-an, industri batik bangkit kembali dengan pasang surutnya dan mengintegrasikan pusat-pusat batik di kota dengan para perajin-pekerja borongan di desa-desa; bahkan, pemborongan pekerjaan pada tahap-tahap tertentu dalam

proses produksi batik menjangkau jauh di luar daerah Yogyakarta (Angelino, 1930:176-183). Pada tahun 1930, tercatat puluhan ribu tenaga kerja terserap ke dalamnya (Sitsen, 1937:197-198). Namun, selama krisis ekonomi, nasib industri batik berkebalikan dengan industri tenun. Selain karena daya beli masyarakat sedang melorot, pada tahun 1934 pemerintah melakukan pembatasan impor kain –termasuk kain putih– untuk melindungi industri tenun (Oorschot, 1956: 45; MvO 1939:219). Pada paruh kedua tahun 1930-an, seiring dengan berdirinya koperasi batik, industri batik di daerah Yogyakarta membaik dan mampu melakukan eksportasi ke luar Jawa (Davis, 1941:49).

Industri perak dan emas, yang berpusat di Kotagede, juga pernah memiliki reputasi yang sangat baik. Pada awal 1890-an, pembuatan barang-barang dari logam mulia sedang merosot seiring dengan terjadinya krisis ekonomi pada paruh kedua tahun 1880-an (K.V. 1892, Bijl. C. 14: 2). Pada awal abad ke-20, industri ini bangkit kembali dan produk-produknya dikagumi di seluruh penjuru Jawa, karena pengerjaannya yang sangat halus dan kaya desain asli (Nakamura, 1983: 45). Tidak jelas kapan mulainya, pada tahun 1922 jumlah penekun industri logam mulia menurun dibanding keadaan pada awal abad ke-20 (Mook, 1958: 289).

Ketika konsumen pribumi tidak dapat lagi dijadikan tumpuan utama, sejumlah pengusaha perak mulai membuat barang-barang yang disukai para wisatawan dan orang-orang Eropa (Soepardi, 1932: 820-821). Kecakapan teknis dan kepekaan estetis terus ditingkatkan; dan dengan ditemukannya pasar baru di luar lingkungan pribumi, pada tahun 1928 industri perak mulai bangkit kembali (“Kunstambachtwerk”, 1941: 215). Sejak saat itu, industri perak yang berpusat di Kotagede terus membesar, dan pada masa-masa terbaiknya (1935-1938) terdiri atas 70 perusahaan dengan 1400 pekerja, yang setiap tahun dapat memproses 25.000 kilogram perak (Nakamura, 1983: 114). Berkat pasar baru dan mutu

produknya, industri perak tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi, bahkan mampu melahirkan raja-raja uang (*ibid.*).

Kotagede sendiri, tempat utama industri perak, merupakan salah satu bukti tentang prestasi besar industri –dan perdagangan– pribumi di daerah Yogyakarta. Pada masa kolonial, bekas kota istana ini merupakan pusat industri dan perdagangan terkemuka, yang telah melahirkan orang-orang kaya dan dari waktu ke waktu selalu menimbulkan kekaguman bagi banyak orang. Pada tahun 1830-an reputasi pedagang-pengusaha Kotagede pun telah tercatat dalam laporan residen. Selain jaringan perdagangannya yang begitu luas, pada waktu itu banyak di antara mereka kekayaannya mencapai 60.000 gulden, saat harga 1 pikul beras hanya 2 gulden (A.V. 1836). Jadi, raja-raja uang pada 1930-an, seperti dikatakan oleh Nakamura, bukanlah fenomena baru bagi Kotagede.

Perkembangan industri seperti telah dibahas di atas kiranya juga memperoleh daya dorong signifikan dari proses moneterisasi. Meskipun jauh sebelum tahun 1830 daerah Yogyakarta sudah mengenal ekonomi uang (Carey, 1981: 13-14), pada periode selanjutnya penyewaan tanah mempengaruhi jumlah uang yang beredar hingga mengalami peningkatan yang tajam (Houben, 2002: 660-661). Bahkan Houben menegaskan, pada periode 1830-1870 ekonomi Daerah Kerajaan sudah termoneterisasi dalam waktu yang jauh lebih cepat dari yang terjadi di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah (Houben, 2002: 660-661).

Mengingat setelah 1870 perkebunan semakin meluas, maka uang yang mengalir ke lingkungan pribumi juga semakin besar. Pada peralihan tahun 1880-an/1890-an, perkebunan Barat di daerah Yogyakarta setiap tahun mengeluarkan uang sebesar 1,5 – 2,0 juta gulden hanya untuk upah buruh pabrik dan pembelian keranjang gula (K.V. 1892, Bijl. C. 14: 2). Bila uang sewa tanah diperhitungkan, jumlahnya tentu jauh lebih besar. Beberapa tahun sebelum krisis ekonomi 1930-an, uang yang mengucur

dari perusahaan-perusahaan gula setiap tahunnya sekitar 8,3 juta gulden (O'Malley, 1977:190). Meningkatnya peredaran uang, kendati jumlah penduduk juga bertambah, merupakan stimulan tersendiri bagi sektor industri. Demikian pula, meningkatnya kemakmuran di daerah *gubememen*, seperti pada periode 1830-1880-an (Fernando, 1993:96-100), tentu juga penting bagi sektor industri di daerah Yogyakarta, karena sejumlah produknya juga banyak diekspor ke sana.

SIMPULAN

Tidak dapat disangkal bahwa hingga tahun 1930-an sektor industri di daerah Yogyakarta tidak pernah mampu menggeser posisi utama sektor pertanian dalam kehidupan ekonomi masyarakat pribumi. Hasil kegiatan dari sektor ini terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian yang tidak hanya sibuk dengan tanaman pangan penduduk, tetapi juga dengan tanaman ekspor kapitalistik-kolonialistik Barat. Dalam perspektif perbandingan, sifat marginalnya pun muncul secara jelas. Meskipun demikian, di dalam dirinya sendiri terdapat spektrum yang amat luas, memiliki keragaman dalam banyak segi, dan ditemukan pula perkembangan yang dinamis.

Sejak awal cabang-cabang usaha dalam sektor industri pribumi di daerah Yogyakarta sangat beragam. Aktualisasinya bergerak dari sekedar industri rumah dengan modal amat kecil dan peralatan sangat sederhana demi memperoleh sedikit tambahan pendapatan hingga industri yang lebih besar dengan modal dan keuntungan yang besar pula. Kegiatan industri tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota, tetapi juga tersebar luas di pelosok-pelosok desa, mengolah bahan-bahan baku lokal ataupun bahan-bahan baku impor. Produk-produknya sedemikian bervariasi, dari barang-barang mewah yang bertengger di keraton megah hingga barang-barang murah yang berserak di dapur petani. Penetrasi pasarnya pun, untuk sejumlah cabang industri, meren-

tang jauh hingga di luar daerah Yogyakarta. Meskipun terganggu, kompetisi dengan produk impor juga tidak terlalu mengecewakan.

Pada periode yang dibicarakan, daya serap industri di daerah Yogyakarta dapat dikatakan relatif tinggi dan cenderung meningkat. Pada 1930, perbandingan antara jumlah tenaga kerja industri dan tenaga kerja pertanian tidak terlalu timpang. Bahkan, dihitung dari jumlah penduduk, persentase jumlah tenaga kerja industri di daerah Yogyakarta pada tahun itu merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa dan Madura, dan jauh di atas persentase rata-rata di kedua pulau tersebut. Realitas ini, bersama-sama dengan keragaman dan prestasi pasar yang pernah diukir, memberi petunjuk bahwa marginalitas industri pribumi di daerah Yogyakarta tidak terlalu tinggi, atau setidaknya berada jauh di bawah garis rata-rata yang tersaji di Pulau Jawa dan Madura.

Keadaan industri pribumi di daerah Yogyakarta yang relatif baik di atas kiranya tidak dapat dilepaskan dari kuatnya tradisi pertukangan dan kerajinan, yang telah bereksistensi sejak zaman Senopati. Awal mulanya, sektor ini terutama diarahkan oleh dan mengabdikan kepada kepentingan istana. Lambat-laun muncul aktivitas produksi yang berorientasi kepada pasar. Orientasi pasar semakin besar seiring dengan terus meningkatnya peredaran uang, baik di daerah Yogyakarta sendiri, maupun di daerah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial. Ketika jumlah uang yang beredar sedang menyusut, dan terobosan-terobosan baru belum dapat ditemukan, sebagian besar industri pribumi juga mengkerut.

DAFTAR RUJUKAN

- "Achterlijkheid Jogjasche Kunstnijverheid", 1926, dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java Instituut*, Zesde Jaargang. *Algemeen Jaarlijks Verslag van de Residentie Djocjokarta (A.V.) over het Jaar 1836*. ANRI. Bundel Yogyakarta.
- Algemeen Jaarlijks Verslag van de Residentie Djocjokarta over het Jaar 1838*. ANRI. Bundel Yogyakarta.
- Alegemeen Verslag van de Residentie Djocjokarta (A.V.) over het Jaar 1840*. ANRI. Bundel Yogyakarta.

- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het Jaar 1852. ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 4c.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het Jaar 1874. ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.14.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het Jaar 1875. ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.19.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het Jaar 1876. ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.18.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het Jaar 1877. ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.17.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het Jaar 1878. ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.16.
- Algemeen Verslag der Residentie Djocjokarta over het Jaar 1879. ANRI. Bundel Yogyakarta. No. 5.20.
- Angelino, P. de Kat. 1930. *Batikrapport II: Midden Java*. Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Burger, D.H. 1939. *De Ontsluiting van Java's Binnenland voor het Wereldverkeer*. Wageningen: H. Veenman & Zonen.
- . 1957. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I*. Djakarta: J.B. Wolters.
- Carey, Peter B.A. 1981. "Waiting for the Ratu Adil ('Just King'): The Javanese Village Community on the Eve of the Java War (1825-30)". Makalah pada Second Anglo Dutch Conference on Comparative Colonial History 23 - 25 September, Leiden.
- Davis, F.J.H. 1941. "De Buitengewesten als Afzetgebied van Javaasche Industrieoederen en als Vestiginggebied van de Nijverheid" dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsche Indie*, Bijzonder Nummer, Mei.
- Fernando M.R. 1993. "Growth of -Agricultural Indigenous Economic Activities in Java, 1820 - 1880" dalam J. Thomas Lindblad (ed.). *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesian Studies.
- Furnivall, J.S. 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: The University Press.
- Graaf, H.J. de dan Th.G.Th. Pigeaud. 1985. *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Jakarta: Grafitipers.
- . 1986. *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Grafitipers.
- Houben, J.H. Vincent. 2002. *Kraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Yogyakarta: Bentang.
- Koloniaal Verslag 1892. Bijlage A. "Beroepen en Bedrijvend door Inlanders en Vreemde Oosterlingen, volgens de over 1890 Verzamelde Opgaven".
- Koloniaal Verslag 1892. Bijlage C, "Overzichten Betreffende den Economischen Toestand van den Verschillende Gewesten van Java en Madoera", untuk nomor-nomor sbb: 13. Kedoe, 14. Djogjokarta, 15. Soerakarta, dan 16. Madioen.
- Koperberg, S. 1922. "De Javaansche Batikindustrie" dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java Instituut*, Jaargang 2. "Kunstambachtwerk", 1941, dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsche Indie*, Bijzonder Nummer.
- Memorie van Overgave van den Afredenden Gouverneur van Jogjakarta H.H. de Cook (MvO) 1934. ANRI. Microfilm, Seri 2e, Film 8.
- Memorie van Overgave van J. Bijleveld, Gouverneur van Jogjakarta 1934-1939. ANRI. Microfilm, Seri 2e, Film 8.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mook, H.J. van. 1958. "Kuta Gede" dalam W.F. Wertheim et al. *The Indonesian Town Selected Studies on Indonesia*. The Hague: W. van Hoeve Ltd.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- O'Malley, William J. 1977. "Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatra and Jogjakarta in the 1930's". Thesis Ph.D. Faculty of the Graduate School of Cornell University.
- Oorschot, H.J. 1936. *De Ontwikkeling van de Nijverheid in Indonesia*. Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve - 's-Gravenhage.
- Ricklefs, M.C. 1974. *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. London: Oxford University.
- . 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rouffaer, G.P. 1904. *De Voornaamste Industrien der Inlandsche Bevolking van Java en Madoera*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Rovers, J.L. 1873. "Bijdrage tot de Kennis der Inlandsche Katoenindustrie op Java" dalam *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie*, Deel XVIII.
- Sitsen, P.H.W. 1937. "De Kleine Nijverheid in Inheemsche Sfeer en hare Expansiemogelijkheden op Java" dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java Instituut*, Jaargang 17.
- Soepardi Prawirodipoero. 1932. "Ontwikkeling der Zilverwerk Industrie te Kotta-Gedeh" dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsche Indie*. Eerste Jaargang, No. 20, 18 November.
- Soerachman. P. 1927. *Het Batikbedrijf in Vorstenlanden*. Weltevreden: Dept. van Landbouw, Nijverheid, en Handel.
- Wilde, C.J.M. Kretschmer de. 1941. "De Kampong aan den Loopende Band" dalam *Economisch Weekblad voor Nederlandsche Indie*, Bijzonder Nummer, Mei.